

Manusia dan Pembangunan

Oleh

Maria Rosari Ana Bano

Mahasiswa Strata Satu Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

SIKORA Account: <https://sikoracerestia.com/profile/meyy> | Email: mrosaribano@gmail.com

MAJ. ARC. COMPLEX II by SMARTA access in SIKORA Cerestia

Pendahuluan

Pembangunan pada hakikatnya adalah sebuah proses transformasi yang berpusat pada manusia, di mana dimensi fisik dan non-fisik berjaln berkelindan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam sejarah peradaban, pembangunan sering kali disalahpahami hanya sebagai akumulasi modal atau peningkatan produk domestik bruto (PDB) semata. Namun, esensi sebenarnya dari pembangunan adalah perluasan pilihan manusia dan peningkatan kapabilitas individu untuk hidup secara bermartabat. Manusia bukan sekadar objek atau faktor produksi dalam pembangunan, melainkan subjek utama yang menentukan arah dan tujuan dari setiap kebijakan publik yang diambil oleh negara.

Interaksi antara manusia dan pembangunan menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana kemajuan material sering kali harus dibayar dengan pergeseran nilai-nilai tradisional. Proses modernisasi yang menyertai pembangunan menuntut adaptasi kultural yang tidak jarang menimbulkan ketegangan di dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal dengan inovasi global, menciptakan harmoni antara kebutuhan masa kini dan warisan masa lalu. Tanpa keterlibatan aktif manusia sebagai aktor intelektual dan moral, pembangunan hanya akan menjadi mesin birokrasi yang dingin dan tidak memiliki jiwa.

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pembangunan telah bergeser dari model eksploitatif menuju model yang lebih inklusif dan memperhatikan batas-batas ekologis. Kesadaran akan keterbatasan sumber daya alam memaksa manusia untuk mendefinisikan ulang makna kesejahteraan yang tidak lagi bersifat antroposentris murni. Pembangunan masa kini dituntut untuk menjawab tantangan kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan secara simultan tanpa mengorbankan hak-hak generasi mendatang. Hal ini memerlukan kerangka berpikir yang holistik dan multidisipliner untuk memahami posisi manusia di tengah pusaran perubahan global.

Struktur sosial masyarakat juga mengalami re-konfigurasi akibat tekanan pembangunan yang masif di berbagai sektor, terutama infrastruktur dan teknologi. Stratifikasi sosial tidak lagi hanya didasarkan pada kepemilikan tanah, tetapi bergeser pada penguasaan informasi dan akses terhadap jaringan ekonomi digital. Perubahan ini membawa dampak pada nilai-nilai kolektivitas yang mulai tergerus oleh semangat individualisme dan kompotisi yang tajam. Namun, di sisi lain, pembangunan juga membuka peluang bagi mobilitas sosial vertikal yang lebih luas bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur secara seragam di seluruh wilayah, mengingat adanya keragaman geografis dan budaya. Setiap wilayah memiliki daya dukung dan daya tampung yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan harus bersifat kontekstual dan partisipatif. Manusia yang hidup di pegunungan memiliki kebutuhan dan cara pandang yang berbeda terhadap pembangunan dibandingkan

dengan mereka yang hidup di pesisir atau pusat kota. Kepekaan terhadap ruang dan konteks sosial inilah yang menjadi kunci bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, aspek psikologis manusia dalam pembangunan sering kali terabaikan dalam perencanaan formal yang bersifat teknokratis. Rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap hasil-pembangunan sangat menentukan keberlanjutan dari proyek-proyek fisik yang dibangun oleh pemerintah. Jika masyarakat merasa tidak dilibatkan atau bahkan disingkirkan oleh proses pembangunan, maka akan muncul resistensi yang dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pembangunan harus mampu menyentuh sisi humanitas, memberikan ruang bagi aspirasi, dan menghargai martabat setiap individu.

Tantangan masa depan pembangunan semakin berat dengan adanya disrupsi teknologi dan perubahan iklim yang tidak terduga. Manusia dituntut untuk memiliki resiliensi yang tinggi dalam menghadapi ketidakpastian global yang dapat mengguncang struktur ekonomi dan sosial sewaktu-waktu. Pendidikan dan pengembangan karakter menjadi pilar utama dalam menyiapkan manusia yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki etika pembangunan yang kuat. Hanya dengan manusia yang berkualitas, pembangunan dapat berjalan di jalan yang benar tanpa mengorbankan kemanusiaan itu sendiri.

BAB I Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Paradigma diartikan sebagai pola atau cara pandang terhadap sesuatu persoalan yang didalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, metode tertentu dan pemecahan masalah tertentu (ABD. Motalib Lubis, 2002).

Paradigma pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) muncul sebagai kritik terhadap model pembangunan konvensional yang cenderung mengabaikan aspek lingkungan dan keadilan sosial jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar tren kebijakan, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial bagi manusia untuk tetap bertahan hidup di planet yang memiliki batas sumber daya. Fokus utama dari paradigma ini adalah integrasi antara tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusi sosial yang adil, dan perlindungan lingkungan yang komprehensif. Paradigma pembangunan yang baik adalah pembangunan berkelanjutan yang menggunakan empat tolak ukur yang meliputi pro ekonomi kesejahteraan, pro lingkungan berkelanjutan, pro keadilan sosial, dan pro lingkungan hidup (Sutisna, 2006; Asih Widi Lestari, 2017).

Dalam konteks struktur sosial, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya perubahan perilaku kolektif dari pola konsumsi yang boros menuju pola hidup yang lebih bertanggung jawab. Hal ini melibatkan rekayasa sosial yang sistematis untuk menanamkan nilai-nilai baru tentang keberlanjutan dalam setiap lapisan masyarakat. Transformasi nilai ini sering kali menghadapi tantangan dari kelompok yang diuntungkan oleh model ekonomi ekstraktif lama, sehingga diperlukan kepemimpinan yang kuat dan regulasi yang tegas.

1.1. Inklusi Sosial dalam Pembangunan Hijau

Pembangunan hijau atau *green development* harus menjamin bahwa tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang ditinggalkan (*leave no one behind*). Pembangunan hijau bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas ekologi, melalui penatakelolaan penyelenggaraan kehidupan bernegara yang baik (Hery Sulistio, et al., 2019). Sering kali, kebijakan lingkungan yang ambisius justru membebani masyarakat kelas bawah melalui peningkatan harga energi atau pembatasan akses terhadap sumber daya alam tradisional. Oleh karena itu, inklusi sosial harus menjadi jantung dari setiap perencanaan pembangunan berkelanjutan untuk mencegah munculnya ketimpangan baru.

Implementasi nilai-nilai inklusi ini tercermin dalam program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Misalnya, pengembangan energi terbarukan di tingkat desa yang dikelola oleh koperasi warga dapat meningkatkan kemandirian energi sekaligus memperkuat ikatan sosial. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pembangunan berkelanjutan tidak lagi dianggap sebagai agenda elit global, melainkan sebagai kebutuhan nyata di tingkat akar rumput.

Struktur sosial yang inklusif memungkinkan terjadinya distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata ke wilayah-wilayah terpencil. Hal ini memicu pergeseran nilai dari kompetisi antarwilayah menuju kolaborasi regional dalam menjaga ekosistem bersama. Masyarakat mulai menyadari bahwa kesejahteraan individu sangat bergantung pada kesehatan ekosistem sosial dan alam yang ada di sekitarnya.

Terakhir, edukasi berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan nilai-nilai hijau ini dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sekolah dan institusi sosial harus berperan aktif dalam membentuk karakter manusia yang peduli pada lingkungan sejak dini. Tanpa adanya

internalisasi nilai-nilai berkelanjutan dalam jiwa setiap individu, segala bentuk kebijakan fisik pembangunan hijau akan kehilangan maknanya dalam jangka panjang.

1.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya pembangunan yang baik dan sehat. Tanpa partisipasi, pembangunan sering kali menjadi proses yang gagal menangkap kebutuhan nyata di lapangan dan cenderung menghasilkan proyek-proyek mangkrak. Partisipasi yang bermakna melibatkan keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka Panjang (Rizky Setiawan, M. Irfan Rosyad, Mohd Rizal Safar, Armadiyansyah Ildo, & Alif Ikhawan Hamonangan, 2024)

Dalam struktur sosial modern, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai saluran untuk melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini memperkuat nilai-nilai transparansi dan kepercayaan antara warga negara dan negara. Masyarakat yang aktif berpartisipasi cenderung memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap infrastruktur publik, sehingga mereka secara sukarela akan menjaga dan memelihara hasil pembangunan tersebut.

1.3. Dinamika Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan kolektif dalam pembangunan memerlukan ruang-ruang publik yang inklusif bagi semua kelompok, termasuk perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat. Musyawarah pembangunan di Indonesia adalah salah satu bentuk formal dari upaya pelibatan ini. Namun, efektivitas partisipasi sering kali terkendala oleh dominasi elit lokal yang dapat mengarahkan hasil musyawarah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Untuk mengatasi dominasi elit, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami isu-isu teknis pembangunan. Literasi anggaran dan pemahaman terhadap dampak lingkungan harus dimiliki oleh warga agar partisipasi mereka tidak sekadar menjadi formalitas administratif. Nilai-nilai kritis dan keberanian berpendapat harus ditumbuhkan melalui organisasi-organisasi masyarakat sipil yang independen dan berdaya.

Partisipasi juga berdampak pada struktur kekuasaan di tingkat lokal, di mana masyarakat yang terorganisir memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam berhadapan dengan investor atau pengembang. Hal ini menciptakan checks and balances yang sehat dalam pengelolaan sumber daya wilayah. Nilai gotong royong tradisional dapat bertransformasi menjadi modal sosial modern yang sangat efektif untuk memperjuangkan kepentingan publik secara bersama-sama.

Secara psikologis, partisipasi memberikan rasa keberdayaan (*empowerment*) bagi individu-individu yang sebelumnya merasa tidak memiliki suara. Ketika ide seorang warga diterima dan diimplementasikan dalam sebuah proyek pembangunan, hal itu meningkatkan harga diri dan identitas mereka sebagai warga negara yang aktif. Inilah esensi dari pembangunan manusia, yaitu memanusiakan manusia dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut hidup mereka.

BAB II Perencanaan Wilayah

Perencanaan wilayah adalah upaya sengaja untuk mengatur pemanfaatan ruang demi mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu secara efisien. Pendekatan perencanaan wilayah masa kini telah bergeser dari sekadar zonasi fisik menuju perencanaan yang berbasis pada kebutuhan dan perilaku manusia (*people-centered planning*). Wilayah tidak lagi dilihat sebagai koordinat geografis belaka, melainkan sebagai wadah hidup yang dinamis di mana berbagai aktivitas sosial berinteraksi secara intens. Model perencanaan ini sering kali digunakan sebagai strategi untuk pengembangan wilayah yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai data sekunder maupun primer.

Struktur sosial di sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh bagaimana ruang-ruang diatur dalam rencana tata ruang. Penempatan fasilitas umum, pusat ekonomi, dan permukiman menentukan pola mobilitas dan frekuensi interaksi sosial antarwarga. Perencanaan yang buruk, seperti zonasi yang sangat kaku, dapat menyebabkan segregasi sosial di mana kelompok kaya dan miskin terpisah secara spasial, yang pada gilirannya akan memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, perencanaan harus dilakukan dengan manajemen yang baik dengan melibatkan partisipasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat secara kolaboratif.

Dalam praktiknya, keberhasilan perencanaan wilayah sangat bergantung pada kemampuan perencana dalam mengidentifikasi keunggulan kompetitif suatu daerah. Misalnya, sebuah wilayah yang terletak di jalur strategis dapat dikembangkan sebagai daerah transit yang mendukung industri pariwisata dan perdagangan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai (Yuanita F.D Sidabutar & Edi Indera, 2021). Produk pariwisata adalah semua bentuk aktivitas manusia yang terjadi di daerah destinasi (Middleton dalam Yuanita F.D Sidabutar & Edi Indera, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan ruang tidak boleh hanya fokus pada satu sektor, tetapi harus mengintegrasikan berbagai potensi yang ada agar dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Lebih lanjut, perencanaan wilayah yang modern menuntut adanya integrasi antara aspek fisik dan aspek digital atau sosial yang berkembang di masyarakat. Perencanaan wilayah di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan ekonomi dan penyediaan aksesibilitas yang inklusif bagi seluruh lapisan warga. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap intervensi keruangan mampu memberikan dampak positif pada kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perencanaan wilayah yang baik harus mampu mengantisipasi perubahan kebutuhan populasi di masa depan melalui kebijakan zonasi yang lebih adaptif.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci utama agar rencana tata ruang tidak berakhir menjadi dokumen di atas kertas semata. Masyarakat sebagai pengguna ruang memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan mereka. Penerapan konsep berpikir dalam meningkatkan nilai ekonomi suatu wilayah memerlukan input langsung dari masyarakat melalui survei dan kuesioner. Tanpa pelibatan publik, pembangunan wilayah berisiko kehilangan relevansinya dan gagal menciptakan harmoni antara ruang fisik dengan dinamika kehidupan sosial yang ada.

Perencanaan wilayah harus mampu menjembatani kebutuhan masa kini dengan keberlanjutan masa depan. Perencanaan bukan sekadar membagi-bagi lahan, melainkan tentang bagaimana menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan manusia secara bermartabat. Di era disrupsi global, fleksibilitas dalam rencana tata ruang menjadi sangat penting agar wilayah dapat dengan cepat beradaptasi terhadap guncangan ekonomi maupun perubahan lingkungan. Dengan perencanaan yang berbasis pada data akurat dan partisipasi

aktif, wilayah akan tumbuh menjadi ruang yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga sehat dan adil secara sosial bagi seluruh penghuninya.

2.1. Harmonisasi Ruang Publik dan Identitas Lokal

Ruang publik merupakan paru-paru sosial bagi sebuah wilayah yang memungkinkan terjadinya pertemuan lintas kelas dan lintas etnis. Perencanaan wilayah yang menyediakan ruang terbuka hijau, trotoar yang nyaman, dan taman kota yang inklusif dapat memperkuat kohesi sosial dan menurunkan tingkat stres masyarakat urban. Nilai-nilai kebersamaan dan keterbukaan tumbuh subur di ruang-ruang yang memungkinkan manusia berinteraksi tanpa hambatan fisik yang berarti.

Perencanaan wilayah juga harus menghormati identitas lokal dan warisan budaya yang ada di suatu tempat. Penghancuran situs-situs bersejarah atas nama modernisasi infrastruktur adalah bentuk kegagalan perencanaan yang mengabaikan nilai-nilai memori kolektif masyarakat. Harmonisasi antara bangunan modern dan karakter arsitektur lokal menciptakan kebanggaan wilayah yang memperkuat rasa identitas bagi para penduduknya.

Dalam konteks perencanaan desa, pendekatan berbasis manusia menekankan pada konektivitas antar-dusun dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Pembangunan jalan lingkungan atau jembatan penghubung bukan sekadar proyek semen dan aspal, melainkan upaya untuk menyambungkan silaturahmi sosial yang sempat terputus oleh kendala alam. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan wilayah memiliki dimensi moral untuk menyatukan masyarakat yang terfragmentasi.

Perencanaan wilayah masa depan harus mengantisipasi dampak bencana alam melalui pemetaan risiko yang akurat. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana harus dilibatkan dalam menyusun rencana evakuasi dan mitigasi berbasis komunitas. Nilai-nilai resiliensi dan kesiapsiagaan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal, yang didukung oleh desain fisik wilayah yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

BAB III Dampak Pembangunan terhadap Ekosistem Sosial dan Tantangan Masa Depan

Setiap tindakan pembangunan fisik selalu menimbulkan resonansi dalam ekosistem sosial masyarakat. Dampak positif seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan sering kali dibarengi dengan dampak negatif berupa degradasi lingkungan dan pergeseran nilai moral. Struktur sosial tradisional yang awalnya berbasis pada solidaritas kekerabatan sering kali goyah ketika diterjang oleh arus industrialisasi dan urbanisasi yang dibawa oleh proyek-proyek pembangunan skala besar.

Tantangan masa depan pembangunan terletak pada kemampuan manusia untuk mengelola konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem sosial. Munculnya kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi mengancam hilangnya banyak pekerjaan tradisional, yang dapat memicu ketimpangan sosial yang lebih tajam. Pembangunan manusia di masa depan harus berfokus pada pengembangan kreativitas dan empati, kualitas yang tidak mudah digantikan oleh mesin.

Pembangunan yang hanya mengedepankan aspek fisik tanpa memperhatikan struktur sosial dan nilai-nilai lokal hanya akan menghasilkan kemajuan semu yang rentan terhadap konflik dan ketidakadilan.

1.3. Resiliensi Nilai di Tengah Disrupsi Global

Di era disrupsi yang ditandai dengan perubahan teknologi yang eksponensial dan ketidakpastian global, nilai-nilai kemanusiaan dasar seperti integritas, kerja sama, dan empati menjadi aset yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Pembangunan modern sering kali terjebak dalam teknosentrisme yang mengabaikan dimensi jiwa manusia, padahal kekuatan sebuah bangsa terletak pada resiliensi mental dan moral penduduknya. Modal sosial yang telah lama ada, seperti kepercayaan (*trust*) dan jaringan pengamanan sosial berbasis komunitas, tidak boleh dihancurkan oleh mesin-mesin pembangunan, melainkan harus diperkuat melalui adaptasi teknologi yang tepat guna. Menurut penelitian terbaru, keberhasilan transformasi digital di tingkat lokal sangat bergantung pada sejauh mana teknologi tersebut mampu mengadopsi dan memperkuat norma-norma sosial yang sudah berlaku di Masyarakat.

Masyarakat yang memiliki resiliensi nilai yang kuat akan lebih mampu menghadapi guncangan ekonomi maupun bencana lingkungan tanpa harus kehilangan jati diri mereka. Ketika krisis melanda, nilai-nilai seperti gotong royong bertindak sebagai katup pengaman yang mencegah terjadinya disintegrasi sosial. Disrupsi global menuntut manusia untuk tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga tangguh secara karakter agar tidak terombang-ambing oleh perubahan yang destruktif. Sebagaimana dinyatakan dalam studi tentang ketahanan komunitas, resiliensi nilai merupakan fondasi utama yang memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan pemulihan mandiri pasca-pandemi maupun bencana alam melalui mobilisasi modal sosial secara kolektif.

Tantangan perubahan iklim yang semakin nyata menuntut masyarakat untuk merombak struktur sosial menuju gaya hidup rendah karbon secara radikal. Ini adalah perubahan nilai besar-besaran yang memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh penduduk bumi, di mana kenyamanan pribadi harus sering kali dikalahkan oleh kepentingan kelestarian planet. Pergeseran ini melibatkan proses dekonstruksi terhadap nilai-nilai konsumerisme akut yang telah lama mendarah daging dalam masyarakat industri. Integrasi nilai-nilai ekologis ke dalam kurikulum pendidikan dan praktek kebijakan publik menjadi syarat mutlak untuk menciptakan manusia yang memiliki tanggung jawab lingkungan (Fauzi & Teuku, 2026)

Pembangunan masa depan akan berfokus pada paradigma ekonomi sirkular, di mana konsep limbah dihilangkan dan sumber daya digunakan kembali secara terus-menerus. Model ekonomi ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan sebuah revolusi etika yang menuntut tanggung jawab moral yang tinggi dari setiap individu dan korporasi. Dalam sistem sirkular, nilai "kepemilikan" mulai bergeser menjadi nilai "pemanfaatan bersama," yang memerlukan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi antar-aktor ekonomi. Ekonomi sirkular memerlukan perubahan pola pikir dari eksploitasi linier menuju regenerasi sistemik yang menghargai setiap unit materi sebagai bagian dari ekosistem yang utuh.

Sebagai penutup, resiliensi nilai di tengah disrupsi adalah tentang kemampuan manusia untuk tetap memanusiakan sesama di tengah dominasi algoritma dan krisis lingkungan. Pembangunan yang sejati harus mampu menciptakan ruang di mana teknologi bekerja untuk memperkuat martabat manusia, bukan sebaliknya. Masa depan pembangunan global sangat bergantung pada keberhasilan kita dalam mengintegrasikan kemajuan material dengan kearifan etis. Dengan nilai-nilai yang resilien, manusia tidak hanya akan bertahan hidup melewati disrupsi, tetapi akan tumbuh menjadi spesies yang lebih bijaksana dalam mengelola rumah besarnya, yaitu bumi.

Daftar Pustaka

- ABD. Mutalib Lubis, S. M. (2002). *Paradigma Pembangunan dan Kapabilitas Aparatur Menyongsong Era Otonomi Daerah*. Medan: Universitas Medan Area.
- Asih Widi Lestari, F. F. (2017). Peran pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development). *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 3(30), 260-265.
- Fauzi, & T. Z. (2026). *Sosiologi Pembangunan*. Jogjakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Hery Sulistio, Nila Ardhyarini H. Pratiwi, Eka Melisa, Suci Maisyarah, Binbin Mariana, Abimanyu S. Aji, & Fika Triandini. (2019). *Meneropong Pembangunan Hijau di Indonesia: Kesenjangan dalam Perencanaan Nasional dan Daerah (Studi Kasus: Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jambi)*. Jakarta: The Partnership for Governance Reform.
- Rizky Setiawan, M. Irfan Rosyad, Mohd Rizal Safar, Armadiyansyah Ildo, & Alif Ikhawan Hamonangan. (2024). PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KEDAH. *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 58-63.
- Sutisna. (2006). *Enam Tolak Ukur Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Regional Development Institute.
- Yuanita F.D Sidabutar, & Edi Indera. (2021). KAJIAN POTENSI PERENCANAAN WILAYAH KOTA BINJAI SUMATERA UTARA. *Jurnal Potensi*, 1(1), 36-49.